

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara mempunyai tujuan nasional dan kebijakan luar negerinya tergantung kebutuhan domestiknya masing-masing dimana setiap negara pasti akan melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Seperti negara besar Amerika Serikat yang pasti memiliki nilai besar pada kebijakan luar negerinya. Pada masa presiden George W. Bush, arah kebijakan Amerika Serikat lebih cenderung mengutamakan *hard power* tanpa memperdulikan kecaman-kecaman yang datang dari negara lain maupun PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) (Mauna, 2005, hal. 663).

Saya mengangkat sebuah kasus pada tahun 2003 yang mengangkat suatu kajian menurut saya kajian ini sangat menarik untuk dipelajari karena setelah banyak membaca dari artikel dan koran adanya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mana awalnya bekerjasama dengan negara di kawasan Timur Tengah menjadi Intervensi yang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap Irak. Dan pada karya ini penulis akan lebih fokus pada kawasan Timur Tengah dengan kasus dampak intervensi yang dilakukan Amerika Serikat ke negara Irak yang menurut penulis menarik untuk dikaji.

Amerika Serikat adalah sebuah negara adidaya yang terletak di kawasan Amerika utara, Amerika Serikat dapat dikatakan adalah sebuah negara besar yang memiliki ilmu

pengetahuan dan teknologi yang maju, disisi lain Amerika Serikat memiliki pengaruh besar dalam berbagai hal seperti ekonomi dan juga politik di level internasional, sebagai negara besar Amerika Serikat mempunyai pengaruh besar akan hal ekonomi dan juga politiknya apalagi antara negara yang bekerjasama dengan Amerika Serikat salah satunya ialah negara-negara kawasan Timur Tengah. Negara di kawasan Timur Tengah adalah salah satu negara terpenting bagi Amerika Serikat dimana Timur Tengah adalah salah satu penghasil minyak terbesar di seluruh dunia (Khosmin & Lubis, 2009, p. 117).

Awalnya sekitar tahun 1960an Amerika Serikat sudah bekerjasama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, namun lama kelamaan Amerika berfikir bahwa negara-negara di Kawasan Timur Tengah dianggap penting oleh Amerika Serikat karena Timur tengah adalah salah satu Kawasan yang penting bagi perekonomian dan perdagangan dunia beberapa abad yang silam dan hingga sekarang masih eksis karena masih memiliki cadangan minyak terbesar didunia. Setelah beberapa dekade Amerika Serikat masih bekerjasama dengan Arab Saudi dan juga Kuwait, banyak terjadi konflik yang terjadi sepanjang tahun itu salah satunya invasi Irak ke Kuwait yang memulai Amerika Serikat lama kelamaan ikut menyelesaikan invasi tersebut dengan cara berdiplomasi agar Irak secepatnya keluar dari Kuwait, bersamaan dengan usaha diplomasi yang dilakukan kepada Irak, dengan presiden Amerika waktu itu atas permintaan Arab Saudi melakukan pembangunan kekuatan militer dengan menerjunkan 40.000 tentara militer untuk membangun pangkalan militer di Arab Saudi (Daalder, Gnesotto, & Gordon, 2006, p. 36).

Adapun gejala yang dihasilkan oleh campur tangan Amerika Serikat kepada negara-negara yang diintervensinya baik menghasilkan dampak positif maupun dampak negatif yang dihasilkannya karena kepentingan nasional negaranya yang berpihak pada satu negara dapat menimbulkan konflik yang baru antar negara. Adapun contoh kebijakan politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap beberapa negara Timur Tengah ialah adanya kekosongan pemimpin setelah runtuhnya Uni Soviet yang didalamnya termasuk negara-negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah seperti minyak bumi yang dimiliki oleh negara Irak. Amerika Serikat mempunyai strategi yang cerdas dimana saat peperangan di Irak Amerika mengintervensi kawasan tersebut dengan tujuan ganda yakni memberi peluang kepada Amerika Serikat untuk tetap bekerjasama dalam hal impor minyak dan kemudian dapat mendampingi aktifitas Israel yang dapat menghadapi konflik dengan Palestina. Kedua aktifitas tersebut berjalan dengan sangat lancar karena adanya kekuatan politik Amerika Serikat di Timur Tengah. (Bennis, 2003, pp. 21-22).

Kemudian, Amerika Serikat dalam membuat strategi yang dapat menghambat adanya perkembangan ideology islam di Timur Tengah setelah adanya kejadian intifadhoh di Palestina. Amerika sampai sekarang masih gencar untuk menyerukan negara demokrasi, ini adalah salah satu strategi untuk lebih mudah menguasai suatu negara dengan cara pemimpin yang diajukan adalah pemimpin yang pro terhadap Amerika Serikat dengan kekuatan yang dimiliki Amerika mampu membuat sebuah konspirasi yang terlihat alami dari sebuah negara demokrasi. Jadi Amerika berusaha agar semua negara-negara yang ada di timur tengah melakukan demokratisasi untuk meminimalisir adanya sikap masyarakat yang di takutkan akan kontra terhadap kebijakan yang akan dilakukan Amerika Serikat (Daulay, 2009)

Republik Irak adalah sebuah negara di kawasan Timur Tengah, yang wilayah terbesarnya mencakup mesopotamia serta ujung barat laut dari pegunungan Zagros dan bagian timurnya Gurun Suriah yang luasnya mencapai 438.052 km². Irak berbatasan langsung dengan Kuwait, Arab Saudi di selatan, Suriah dan Yordania di barat, Turki di utara, dan Iran di timur. Irak merupakan salah satu negara yang menarik untuk dikaji karena merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang seringkali menghadapi konflik perang. Kali ini Irak diintervensi oleh Amerika Serikat. Berikut ini akan sedikit diuraikan tentang faktor apa yang menyebabkan Amerika Serikat ikut campur dalam konflik yang berlangsung di Irak pada tahun 2003. (Sihbudi R. , 2007, hal. 422-425).

Perang yang seringkali terjadi di Irak hanya bernuansa ideologi dimana Amerika Serikat seringkali membawa isu tersebut ke dunia internasional yang memicu banyak respon dunia yang otomatis negara lain akan mendukung Amerika Serikat karena isu yang dibawa sangat serius seperti isu terorisme. Dengan isu tersebut Amerika dapat melakukan intervensi kepada negara tersebut contohnya seperti afganistan, yang lambat laun menjalar ke negara Irak. Mengapa Irak? Karena Amerika menganggap bahwa presiden Irak Saddam Hussein adalah presiden yang ditaktor yang telah

memerintah Irak dengan tangan besinya, tidak sedikit masyarakat Irak yang level ekonominya di bawah rata-rata, menengah maupun level atas itu semua karena masa pemerintahannya, Saddam Hussein juga dianggap sebagai penindas masyarakatnya. kemudian disinilah Amerika mempunyai peluang untuk dapat menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein dengan isu terorisme dan kepemilikan senjata pemusnah massal kemudian Saddam Hussein juga menghalangi proses demokrasi di Timur Tengah, Pemimpin Irak yang dapat dikatakan tidak pro dengan Amerika maka dari itu Amerika ingin menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein dan lebih

mudah menjadikan Irak negara yang demokratis (Daulay, 2009, pp. 9-28).

Kajian ini sangat menarik untuk pelajari karena menurut presiden ke 39 Jimmy Carter: Tindakan Amerika Serikat di Timur Tengah mendekati kejahatan perang karena setiap serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat seringkali menewaskan warga sipil yang tidak ikut andil dalam konflik dan jikalau ada peperangan yang terjadi dengan memikirkan jalan kelur seharusnya perang adalah jalan terakhir yang diambil dan ketika perang terjadi pun Amerika Serikat seharusnya mengikuti aturan-aturan peperangan yang ada. Kemudian Presiden ke 39 itu menambahkan bahwa Amerika Serikat adalah Negara besar yang seringkali berperang jika dibandingkan dengan China yang sejak 1979 tidak pernah berperang (Maulana, 2018). Masalah yang telah terjadi sebagaimana telah dijelaskan di atas akan dibahas menggunakan kebijakan Luar Negeri yang pada akhirnya akan melahirkan kepentingan nasional.

Penelitian sejenis juga pernah dilakukan Nur Ika Herning wijayanti terbit pada tahun 2006. Namun terdapat perbedaan penulisan dan pembahasan yang terdapat pada karya tulis ini yakni Wijayanti menulis studi kasus yang fokus pada jalan cerita sebelum terjadi intervensi dan waktu terjadinya intervensi Amerika dan Irak (Wijayanti, 2006). Dan untuk tulisan ini penulis mengambil studi kasus tentang dampak kebijakan Amerika Serikat pasca intervensi Amerika Serikat terhadap Irak dan penulis hanya mengambil sisi dari faktor intervensi Amerika pada tahun 2003 hingga menulis dampak dari intervensi tersebut sampai tahun 2018.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak kebijakan invasi Amerika Serikat tahun 2003 terhadap Irak?

1.3 Kerangka Teori

1.3.1 Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi yang seringkali dipraktikkan oleh seluruh negara dengan cara yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Demokrasi telah menjadi sebuah paradigma dalam bahasa komunikasi dunia dalam sistem pemerintah dan sistem politik yang dianggap ideal (Asshiddiqie, 2005, p. 141). Maka dari itu, menurut Ni'matul Huda (Huda, 2005, p. 259) demokrasi adalah sebuah asas dan sistem yang tidak dapat dibantah karena sistem tersebut sangat baik di dalam sistem politik maupun ketatanegaraan. Di era modern ini tidak sedikit negara yang mengklaim bahwa negaranya adalah penganut sistem demokrasi. Dari penelitian Amos J. Peaslee, pada tahun 1950, dari 83 Undang-Undang Dasar negara-negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%) (Peaslee, 1950). Kemudian menurut penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949, menyatakan bahwa (Peter, 1964):

“mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all system of politic and social organizations advocated by influential proponents)”.

Hampir semua negara telah menerapkan definisi dan kriterianya dalam demokrasi, tidak sedikit juga yang justru mendorong dengan cara yang tidak demokrasi pula, walaupun di atas kertas menyebut “demokrasi” sebagai dasarnya yang fundamental. Maka dari itu, studi mengenai politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi normatif dan demokrasi empirik.

Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaan di lapangan tidak selalu sesuai dengan gagasan normatifnya (Huda, 2005, p. 260).

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas tentang sejarah demokrasi. Pada masa ini demokrasi dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain (Huda, 2005, p. 263): demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Dari banyaknya aliran pemikiran tentang demokrasi, adanya dua kelompok yang terpenting, yaitu: demokrasi konstitusional dan kelompok demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme. Terdapat perbedaan fundamental di antara kedua kelompok tersebut ialah bahwa demokrasi konstitusional memiliki tujuan yakni pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, artinya suatu negara (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *rule of law*. Sedangkan demokrasi yang berdasarkan dirinya sebagai komunisme, memiliki tujuan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter.

Ciri khas dari demokrasi konstitusional yakni gagasan berupa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan dalam bertindak semaunya atau sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara tidak memusatkan pada satu pemerintahan atau satu badan saja. Perumusan yuridis dan prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan Rule of Law (Huda, 2005, p. 265).. Dalam pandangan kelompok aliran demokrasi yang mendasarkan dirinya atas paham komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya

masyarakat komunis. Kata Marx dan Engels: “ Negara tidak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain” dan “negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan.” Menurut Henry B. Mayo yang diikuti oleh Ni“matul Huda di dalam bukunya “Hukum Tata Negara Indonesia”, memberi defenisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut (Huda, 2005, pp. 265-267):

“Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu terjaminnya kebebasan politik” (*A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective populer control at periodic alection which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.*)

Kemudian Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict);
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing society)
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rulers)
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion)
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat yang

- tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Sementara menurut Nurcholis Madjid, ternyata pandangan hidup demokrasi haruslah didasari atas tujuh norma sebagai berikut (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, p. 113):

1. Kesadaran atas pluralisme Masyarakat sudah dapat memandang secara positif kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat, serta telah mampu mengelaborasi ke dalam sikap tindak secara kreatif.
2. Musyawarah Korelasi prinsip ini ialah kedewasaan untuk menerima bentuk-bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik.
3. Pemufakatan yang jujur dan sehat Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai pemufakatan yang juga jujur dan sehat, bukan pemufakatan yang dicapai melalui intrikintrik yang curang, tidak sehat atau yang sifatnya melalui konspirasi.
4. Kerjasama Prinsip kerjasama antar warga dalam masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukungmendukung secara fungsional antar berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi Untuk mendukung hadirnya situasi demokrasi dalam masyarakat sangat perlu memperhatikan pemenuhan segi-segi ekonominya terutama pemenuhan terhadap keperluan pokok, yaitu pangan, sandang dan papan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi harus pula mempertimbangkan

aspek keharmonisan dan keteraturan sosial (seperti masalah mengapa kita makan nasi, bersandangkan sarung, kopiah, kebaya, serta berpapankan rumah „joglo“ yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya).

6. Pertimbangan moral Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara berdemokrasi haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik haruslah diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya.
7. Sistem pendidikan yang menunjang Pendidikan demokrasi selama ini pada umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinasi dan penyusunan konsep-konsep secara verbalistik. Terjadinya diskrepansi (jurang pemisah) antara *das sein* dan *das sollen* dalam konteks ini ialah akibat dari kuatnya budaya ”menggurui” dalam masyarakat kita, sehingga verbalisme yang dihasilkannya juga menghasilkan kepuasan tersendiri dan membuat yang bersangkutan merasa telah berbuat sesuatu dalam penegakan demokrasi hanya karena telah berbicara tanpa perilaku.

Namun menurut Robert. A. Dahl, yang diikuti Muntoha dalam jurnalnya yang berjudul “Demokrasi dan Negara Hukum” menyatakan, Demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu (Muntoha, 2009):

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat
2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif
3. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian

terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis

4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat
5. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Kemudian diikuti dengan pandangan lain, demokrasi merupakan suatu gagasan politik sebagai paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut (Gaffar, 2005, p. 15):

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau ke kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai
5. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih
6. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam menjalankan demokrasi tentunya diperlukan berbagai lembaga yang demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan bersrikat, dan lain-lain.

Untuk dapat melaksanakan demokrasi harus perlu bantuan dari beberapa lembaga yang nantinya dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut, yaitu (Huda, 2005, p. 267):

1. Suatu pemerintahan yang bertanggung jawab
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang dapat mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Itulah landasan mekanisme kekuasaan dalam konsepsi demokrasi, yang berdasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia.

1.4 Tujuan Penelitian

Agar dapat menjelaskan dan memahami dampak ancaman keamanan yang disebabkan oleh negara lain seperti program rekonstruksi Amerika Serikat terhadap Irak pasca invasi 2003.

1.5 Hipotesa

Dari rumusan masalah dan kerangka teori yang telah ditulis dan dipaparkan di atas penulis menarik hipotesa yakni:

Dampak kebijakan invasi Amerika Serikat tahun 2003 terhadap Irak adalah terjadi Perubahan tatanan politik yang mendorong Irak menjadi negara yang demokrasi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ini menggunakan metode kualitatif. Hal tersebut digunakan karena kajian dan permasalahan dapat dikaji melalui data-data yang di dapat karena menurut pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tidak terlihat dibalik suatu fenomena yang seringkali susah untuk di pahami secara memuaskan, dan menurut Creswell, yang dimaksud dengan penelitian

kualitatif yakni sebuah metode yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di peroleh dengan penelitian statistic ataupun kuantitatif (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat , tingkah laku, sejarah, aktifitas sosial dan lain-lain (Creswell, 1998). Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk menulis skripsi dengan mendeskripsikan melalui cara-cara menentukan masalah atau bidang yang diamati dan rumuskan submasalah secara terperinci

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan teknik pengumpulan data penulis melakukan penelaahan kepustakaan dengan benar yang memanfaatkan data sekunder yang di peroleh dari buku-buku, jurnal. Surat kabar (koran), website resmi, dan juga tulisan-tulisan yang membahas tentang permasalahan yang terkait dalam skripsi, kemudian pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data-data sekunder yang di peroleh dari perpustakaan agar bisa mendukung penelitian ini sesuai dengan topik yang dikaji dan dapat di uji kebenarannya dan pembakuan instrument, adanya analisis data dan kemudian penulisan laporan (Yusuf, 2014, p. 46)

1.7 Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi analisis, jangkauan penelitian ini dibatasi dengan jangka waktu, agar tinjauan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis memberikan batasan pada tahun 2003-2005 pada saat Amerika memasuki ranah politik Irak dan mulai mengintervensi Irak, hingga dampak yang diakibatkan oleh Irak sampai penghujung tahun 2005 dan kemudian dengan menggunakan konsep politik luar negeri dan juga kepentingan nasional (national interest).

1.8 Sistematika Penulisan

Setelah diawali dengan pemilihan judul lalu penulis akan memberikan gambaran besar tentang skripsi ini, penulis akan membagi atas 5 bab yang akan diikuti dengan beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I berisikan pendahuluan yakni latar belakang masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan juga sistematika penulisan, BAB II menjelaskan sejarah politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah & Irak, dilanjutkan dengan BAB III, Dalam bab ini penulis akan menjelaskan faktor-faktor invasi Amerika Serikat di Irak, diikuti BAB IV, bab ini akan melihat dampak yang diakibatkan oleh invasi Amerika Serikat di Irak. Yang terakhir BAB V, Bab terakhir yang akan menyimpulkan semua penulisan dan menegaskan hasil penelitian skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bennis, P. (2003). *Before and After-US Foreign Policy and The War On Terrorism*. New York: Olive Branch Press.
- Creswell, J. W. (1998). *Research Design: Qualitatif & Quantitatif Approaches*. London: Sage Publications.
- Daalder, I., Gnesotto, N., & Gordon, P. (2006). *Crescent of Crisis, US- European Strategy For the Greater Middle East*. Whashington D.C: Brooking Institution press .
- Daulay, R. M. (2009). *Amerika VS Irak "Bahaya Politisasi Agama"*. Jakarta: Penerbit Libri.
- Gaffar, A. (2005). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khosmin, A., & Lubis, K. M. (2009). *Geografi*. Jakarta: Grasindo.
- Maulana, V. (2018). *Jimmy Carter: Tindakan AS di Timur Tengah Mendekati Kejahatan Perang*. Washington: SINDOnews.com.
- Mauna, B. (2005). *Hubungan Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P. T Alumni.

- Muntoha. (2009, Juli). Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum, 13*, 3.
- Peaslee, A. J. (1950). Constitutions of Nation. *Nederlands Tijdschrift Voor Internationaal Recht, I*, 417-418.
- Peter, S. B. (1964). *Principle of Political Thought*. New York: Colliner Book.
- Sihbudi, R. (2007). *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim*. Jakarta Selatan: Mizan Publika.
- Tim ICCE UIN Jakarta. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Wijayanti, N. I. (2006). Intervensi Amerika Serikat Terhadap Irak dalam Perang Teluk III tahun 2003. *Universitas Sebelas Maret Institutional Repository*.
- Yusuf, A. (2014). *Metode Penelitian; kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.